

MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI MALUKU BERAWAL DARI DESA

SJAHRUL BUSTAMAN¹ DAN LUTHFIE HUTUELY²

¹⁾ Balai Besar Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian

²⁾ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku

ABSTRAK

Saat ini di Maluku ada 815 desa (93 %) dengan pendapatan penduduknya berasal dari pertanian, dengan penduduk miskin di tahun 2003 masih ada 399.900 jiwa (32,85%). Pembangunan ketahanan pangan daerah diawali dengan membangun ketahanan pangan rumah tangga di desa melalui peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi pangan. Sumber pangan lokal seperti sagu, aneka umbi, jagung, serelia dan padi selama ini dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat sedangkan sumber protein adalah ikan dan kacang-kacangan. Tersediannya areal pengembangan pertanian di 8 kabupaten/kota (12 gugus pulau) dapat dijadikan modal dasar dalam penyediaan bahan pangan ke depan. Indikator tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Tingkat Ketahanan Pangan (TKP) rumah tangga petani. Upaya membangun ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dengan penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi dan peningkatan pemanfaatan lahan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan diperlukan empat program pokok yaitu : (1) Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat, (2) Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan, (3) Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan, dan (4) Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan. Partisipasi Pemerintah Daerah (Bappeda, Dinas Pertanian Kabupaten/kota), BPTP, dan Masyarakat desa/petani secara aktif dan mempunyai rasa memiliki diperlukan dalam membangun ketahanan pangan mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaannya. Kelembagaan penguatan modal kerja dan kelompok tani sedapat mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah. Institusi seperti Pekerjaan Umum, Koperasi, Bulog dan Perdagangan juga mempunyai tanggungjawab bersama atas keberhasilannya ketahanan pangan desa.

Kata Kunci : *Ketahanan pangan, Maluku, Pembangunan desa*

PENDAHULUAN

Wilayah Maluku terdiri dari 1124 pulau, dengan luas daratannya sekitar 4.625.416 Ha atau 10% dari total luas wilayah. Pulau-pulau yang ada sebagian besar adalah pulau kecil yang memiliki karakteristik berbeda-beda seperti aspek geografis, iklim, sosial, budaya, etnis, dan tahapan perkembangan ekonominya. Pemda Maluku dalam melakukan pembangunan di wilayah kepulauan melakukan pendekatan melalui konsep gugus pulau (12 gugus pulau), yang selayaknya oleh pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangan otonominya membagi kedalam zona pembangunan.

Saat ini di Maluku ada 815 desa (BPS, Maluku 2006a) dengan pendapatan penduduknya berasal dari pertanian. Desa ini tersebar di 8 kabupaten/kota. Sektor pertanian merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian Maluku. Ditahun 2004 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 35,75% (termasuk subsektor perikanan).

Pembangunan desa identik dengan pembangunan pertanian, hal ini karena sebagian besar pendapatan rumah tangga di pedesaan berasal dari sektor pertanian. Tujuan pembangunan pertanian adalah: (1) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian, (2) Meningkatkan cadangan devisa, (3) Meningkatkan kesempatan kerja, dan (4) Meningkatkan ketahanan pangan. Sasaran pembangunan pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa yang tercermin dengan meningkatnya pendapatan petani, produktivitas tenaga kerja pertanian, berkurangnya penduduk miskin, ketahanan pangan masyarakat desa meningkat serta berkurangnya ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap struktur pendapatan rumah tangga pedesaan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya baik alam maupun tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, juga dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap penguasaan modal dan keterampilan. Sementara pendapatan usahatani sangat bergantung kepada penguasaan lahan dan tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi ditentukan oleh struktur biaya

dan profitabilitas. Makin efisien usahatani yang diusahakan diharapkan pendapatan petani dari usahatani menjadi semakin meningkat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian maka konsistensi pertumbuhan merupakan syarat keharusan untuk menjamin pembangunan pertanian agar mampu membawa misi pemerataan, pengentasan kemiskinan dan meningkat ketahanan pangan masyarakat (Arifin, 2004). Dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah pedesaan, diperlukan identifikasi peubah penjelas yang menyebabkan terjadinya dinamika indikator pembangunan pedesaan. Peubah tersebut dapat dikelompokkan kedalam, (1) Variabel produksi yang terdiri dari produktivitas, harga output, penggunaan input produksi (benih, pupuk, dan tenaga kerja) dan harga input (benih, pupuk, dan tenaga kerja), dan (2) Variabel kesejahteraan meliputi, pendapatan, pengeluaran rumah tangga, harga barang konsumsi dan meningkatnya ketahanan pangan masyarakat tani (Sudana, 2007).

Salah satu alat indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP), yang merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. NTP ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena mengingat sebagian besar pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari kegiatan usaha pertanian.

Besar kecilnya NTP ini dipengaruhi oleh produktivitas usahatani, pola tanam, jenis tanaman yang diusahakan serta efisiensi usahatani. Produktivitas dan efisiensi usahatani sangat ditentukan oleh kualitas lahan serta inovasi teknologi yang diterapkan petani.

Selain itu tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani dapat merupakan indikator kesejahteraan petani. Semakin tinggi tingkat ketahanan pangan, yang ditunjukkan oleh semakin kuatnya pemenuhan kebutuhan dan produksi sendiri atau semakin banyak stock pangan menunjukkan semakin sejahtera rumah tangga petani. Dimana tingkat ketahanan pangan (TKP) = 1 berarti produksi masih untuk mencukupi kebutuhan sendiri, $TKP > 1$ (surplus) dan $TKP < 1$ (defisit).

Membangun ketahanan pangan Maluku dimulai dengan membangun ketahanan pangan rumah tangga di desa melalui peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal (alternatif) seperti sagu, umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, padi ladang, sapi potong, ayam buras, dan babi. Hal ini sejalan dengan pengembangan komoditas pada program revitalisasi pertanian Maluku dalam program utama ketahanan pangan.

Sebagian besar desa yang ada di pulau-pulau memiliki lahan sagu dan lahan kering, dengan usahatani tanaman pangan dan perkebunan. Usaha peternakan bukan merupakan mata pencaharian utama. Dalam upaya membangun ketahanan pangan desa, pemanfaatan lahan kering dan komoditas yang akan dikembangkan disesuaikan dengan pola makan masyarakat desa sangat memegang peranan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada usahatani didesa kepulauan antara lain; (1) Sarana agroinput masih didatangkan dari luar Maluku dan masih berpusat paling dekat diibukota kabupaten atau kecamatan, (2) Produktivitas hasil yang masih rendah; (3) Transportasi untuk pemasaran hasil, (4) Lembaga pemasaran dan penguatan modal yang belum dimiliki desa.

Inovasi teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan BPTP Maluku dapat dipakai sebagai teknologi anjuran dalam meningkatkan produktivitas. Sedangkan dinas pertanian dan BAPPEDA Kabupaten/Kota memfasilitasi dalam pada layanan penguatan modal kerja.

KERAGAAN DESA PERTANIAN DI MALUKU

Potensi Sumberdaya Lahan

Hasil sensus ekonomi th 2005 (BPS Maluku 2006a) memberikan data dan informasi dimana ada 815 desa (93%) di Maluku dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya disektor pertanian. Komposisi bidang usaha dari desa tersebut adalah sebagai berikut; (1) Tanaman pangan (398 desa); (2) Perkebunan (318 desa); (3) Perikanan (87 desa) dan (4) Kehutanan (3 desa). Keadaan ini menunjukkan

banyak petani didesa pada wilayah kepulauan memiliki lapangan kerja pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan lahan kering (tabel I).

Tabel I. Sebaran desa pertanian, luas areal lahan kering untuk tanaman pangan dan perkebunan di 8 Kabupaten/Kota.

Kabupaten/ Kota	Desa	Areal Pengembangan Lahan Kering (Ha)		Potensi lahan Kering (Ha)
		Tanaman Pangan	Perkebunan	
Maluku tenggara barat	187	59.866	324.068,4	407.233,4
Maluku Tenggara	111	4.194	39.411,4	67.068,4
Maluku Tengah	150	108.577	137.779,7	279.267
Buru	92	14.388	7.091,7	54.381,4
Kepulauan Aru	118	349.519	22.492,7	582.302,7
Seram Bagian Barat	86	40.496	70.421,6	139.452,6
Seram Bagian Timur	57	349.519	299.746,5	450.898,5
Kota Ambon	14	1.207	-	1.436
TOTAL	815	695.930	1.106.042	1.982.040

Sumber : Susanto dan Bustaman (2006); BPS Maluku 2005 & 2006

Umumnya komoditas pertanian lahan kering yang dikembangkan didesa seperti dari; (1) Subsektor tanaman pangan adalah kacang-kacangan, umbi-umbian lainnya, jagung, ubi kayu, padi ladang dan kedelai, (2) Subsektor perkebunan: cengkeh, pala, kakao, kelapa dan jambu mete; (3) Subsektor peternakan: sapi potong, ayam buras, dan babi. Rata-rata lahan yang dimiliki oleh rumah tangga usaha palawija 8.539m² sedangkan lahan yang diusahakan 2.345m². Sedangkan pada usaha perkebunan lahan yang dimiliki petani 2Ha akan tetapi baru diusahakan ±1 Ha.

Sebagian besar pendapatan rumah tangga (60%) kebutuhannya dapat terlengkapi dari usaha palawija, begitu pula pada usaha perkebunan, dimana sekitar 59% rumah tangga menyatakan kebutuhannya jelas tercukupi. Selain itu tanaman sagu oleh masyarakat desa dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan, pemasok karbohidrat utama dan telah terbukti mampu mengatasi masalah pangan lokal (selain jagung dan umbi-umbian). Pada era th 1980an, sebanyak 33% masyarakat Maluku menjadikan sagu sebagai makanan pokok, 50% menggunakan sagu dan umbi-umbian dan hanya 17% menggunakan beras sebagai makanan pokok (Louhenapessy, 2006). Namun saat ini telah terjadi pergeseran pola konsumsi pangan dari non beras ke dominan beras, akan tetapi pada masyarakat desa terutama yang tinggal dipulau-pulau masih banyak dengan pola konsumsi pangan jagung, umbi-umbian, sagu dan pisang.

Menurut Louhenapessy (2006), Maluku memiliki areal sagu seluas 26.410 Ha, dengan sebaran di kecamatan. Piru seluas 320 Ha, Kairatu 2.350 Ha, Amahai 1.150 Ha, Buru Utara Barat 240 Ha, Buru Utara Timur 7.800 Ha dan kep. Aru 9.762 Ha. Sementara itu berdasarkan pada peta Zona Agroekologi (BPTP Maluku, 1999) luas potensi lahan untuk pengembangan sagu di Maluku mencapai 649,937,85 ha, yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat 948,54 ha, Maluku Tenggara 5.161,78 ha, Maluku Tengah 104.640,00 ha, Buru 34.887,50 ha, Seram Bagian Barat 36.871,20 ha, Seram Bagian Timur 114,497,19 ha, Kepulauan Aru 351.493,64 ha dan Kota Ambon 1.436,00 ha, (Susanto dan Bustaman, 2006).

Dalam usaha mensubstitusi sagu 15% sagu kedalam pola konsumsi pangan, harapan masyarakat Maluku (135 kg setara beras/kapita/tahun) dibutuhkan luas panen sagu 22.873 ha pada tahun 2006 dan 24.128 ha pada tahun 2007, dengan asumsi panen di lakukan setiap 2 tahun (Bustaman & Susanto, 2006).

Berdasarkan peta ZAE dari total luas daratan 4.625.416 ha (BPTP Maluku, 1999), tersedia lahan potensial yang disarankan untuk tanaman pangan dan hortikultura lahan basah seluas 55.612 ha. Sedangkan yang baru dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah 9.324 ha yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah 3.035 ha, Seram Bagian Barat 878 ha dan Kab. Buru 5.411 ha dengan rata-rata produksi 3,5 ton/ha GKP. (BPS Maluku 2006). Untuk memenuhi kebutuhan beras masih didatangkan dari luar Maluku.

Kondisi Pedesaan

Menurut Suryahadi (2007) kondisi pedesaan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut; (1) Wilayah pedesaan memiliki kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah; (2) Konsentrasi penduduk miskin; (3) Tidak banyak tersedia kesempatan kerja produktif dan alternatif pekerjaan diluar sektor pertanian; (4) Ditinggalkan oleh pekerja usia muda dan berpendidikan; (5) Menghadapi persoalan ketidakberdayaan dan keterkucilan.

Sampai saat ini pemda Maluku belum mampu membuat jalan aspal sampai keseluruh desa maupun memenuhi kebutuhan listrik (PLN) untuk kebutuhan rumah tangga. Baru sebanyak 456 desa kebutuhan listriknya dari PLN sedangkan 256 desa non PLN (Swasta) begitu pula terhadap penerangan jalan, dimana 43 desa penerangan jalan utama listrik PLN, 37 desa listrik Non PLN, 5 desa non listrik dan yang terbanyak 716 desa tidak ada penerangan (BPS Maluku 2006a).

Indikator awal yang memberikan petunjuk bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat adalah (1). Berkurangnya jumlah penduduk miskin, (2). Pengeluaran perkapita per bulan, (3). Pola pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin secara umum didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayah tempat tinggalnya. Distribusi penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2003.

Kabupaten/Kota	Desa	D	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (%)	Cari Kemiskinan Rp/Kap/Bln
		1	62.10		
		87	0		
		2	71.30		
Maluku Tenggara Barat		39	0	44,17	126,544
Maluku Tenggara		2	210.7	38,18	125,501
Maluku Tengah		93	00	38,32	129,995
Buru		9	38.30	32,57	124,243
Ambon		2	0	7,89	137,326
Maluku		1	17.60	32,85	128,430
		4	0		
		8	399.9		
		15	00		

Sumber : BPS Maluku 2006c; Catatan : Data sebelum pemekaran menjadi 8 Kabupaten/Kota

Apabila batas / garis kemiskinan US\$ 2 per hari (\pm Rp. 20.000,-/hari) maka sebanyak 110 juta penduduk Indonesia Masoh miskin. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan pasti pengeluaran akan bergeser dari makan ke bukan makanan. Dalam kondisi pendapatan yang terbatas (tahun 2003) dari total pengeluaran Rp. 175.893, pengeluaran makanan perkapita sebulan adalah Rp. 122.986 (69.92%) sedangkan pengeluaran bukan makanan Rp. 52.906 (30,08%). Walaupun dari segi pendapatan masyarakat desa di Maluku masih kecil atau masih banyaknya penduduk miskin, akan tetapi berita kekurangan pangan atau gizi jarang terdengar kecuali adanya bencana kekeringan. Hal ini disebabkan masih tersedianya berbagai sumber makanan di desa seperti sagu, umbi-umbian dan ikan, asalkan ada usaha untuk memperolehnya.

PEMBANGUNAN PEDESAAN

Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Pembangunan pedesaan harus mampu memberikan manfaatnya bagi kaum miskin yang mencari nafkahnya di pedesaan. Strategi pembangunan pedesaan dihadapkan pada beberapa kenyataan seperti : (a) tingkat produktifitas pertanian dan sektor lain yang terkait masih rendah dan laju perubahan penduduk kearah usaha dengan imbalan lebih tinggi berjalan relatif lambat; (b) sebagian besar penduduk pedesaan menghadapi kemiskinan dalam berbagai tingkatan dengan berbagai keterbatasan dalam akses terhadap sumberdaya, teknologi, kelembagaan dan organisasi; dan (c) daerah pedesaan mempunyai tenaga kerja, lahan dan modal lain yang bila dimobilisasi dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. (Ananto, 2007).

Beberapa potensi dalam membangun pedesaan adalah; (1) Masyarakat pedesaan memiliki modal sosial dalam bentuk rasa saling percaya yang relatif tinggi; (2) Memiliki potensi konflik yang relatif lebih rendah; (3) Ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan relatif rendah; (4) Akses perempuan terhadap aset ekonomi keluarga relatif lebih tinggi.

Sementara itu hambatan yang akan ditemukan dalam pembangunan pedesaan antara lain: (a) Wilayah pedesaan memiliki kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang lebih rendah; (b) Masyarakat pedesaan memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan dasar (pendidikan & kesehatan); (c) Akses yang terbatas terhadap sarana permodalan dan pemasaran; (d) Umumnya memiliki iklim usaha yang kurang kondusif

Kemiskinan di Maluku sebagian besar masih merupakan suatu fenomena pedesaan. Kebanyakan penduduk miskin tergantung secara langsung dan tidak langsung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatannya. Oleh karena itu pertumbuhan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian sangat penting dalam mengurangi kemiskinan di Maluku. Sebagaimana diketahui pengurangan kemiskinan itu sendiri tergantung 2 faktor yaitu (1) pertumbuhan, dan (2) distribusi manfaat pertumbuhan bagi yang miskin dan non miskin. Definisi umum menyatakan pertumbuhan dianggap pro-poor bila terjadi penurunan angka kemiskinan; apakah manfaatnya sendiri dirasakan oleh yang miskin maupun non miskin. Sebaliknya ada definisi yang lebih ketat, bahwa bila hanya manfaat pertumbuhan telah dinikmati oleh sebagian orang miskin baru dapat dikatakan pro-poor.

Pengalaman membuktikan bahwa pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan pertanian yang cepat pada tahun 1980 dan 1990-an, terjadi penurunan kemiskinan secara drastis (4,5% per tahun). Bila dilihat dari besarnya tenaga kerja yang diserap oleh kegiatan-kegiatan sektor pertanian dan kegiatan usaha (mikro, kecil, dan menengah) terkait dengan pemanfaatan produk pertanian mencapai lebih dari 90% dari total tenaga kerja yang terserap. Maka sangat logis apabila peningkatan kesejahteraan penduduk terutama dalam kerangka pengentasan kemiskinan tetap bertitik tolak dari pembangunan pertaniannya. Hal ini dikuatkan dengan suatu studi bahwa setiap peningkatan 10% dalam produktivitas pertanian akan berpengaruh langsung dalam penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 6%. (Ananto, 2007)

Telah diketahui bahwa pertumbuhan pertanian dapat berpengaruh secara berantai (multiplier effects) terhadap penduduk pedesaan antara lain peningkatan pendapatan petani dari kenaikan produksi dan usaha pengolahan, peningkatan upah buruh tani, peningkatan ketahanan pangan pedesaan, dan membuka peluang usaha untuk berbagai jenis jasa yang terkait dengan pemanfaatan produk pertanian dan hasil sampingnya untuk pangan dan non pangan. Namun harus disadari pula bahwa bila tingkat kemiskinan makin berkurang, sektor pertanian bukanlah satu-satunya yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan makin meningkat kesejahteraan penduduk, kontribusi pertanian akan semakin menurun.

Proses pertumbuhan menciptakan peluang ekonomi baru yang tidak terdistribusi merata. Orang miskin umumnya menghadapi kendala dalam memanfaatkan peluang tersebut. Pemerintah perlu membantu yang miskin dengan merumuskan kebijakan dan program yang memfasilitasi partisipasi penuh bagi sebagian masyarakat yang kurang beruntung tersebut.

Pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan sukar dipisahkan karena keduanya terjalin saling terkait. Pertumbuhan pertanian akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dimana tambahan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertanian mendorong pembangunan pedesaan yang selanjutnya

akan meningkatkan standar hidup masyarakat – yang miskin atau yang kaya. Pemberdayaan petani miskin dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan pada salah satu program Badan Litbang Pertanian yaitu Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi. (P4MI) yang bertujuan untuk pemberdayaan petani miskin di daerah lahan kering marjinal dalam upaya meningkatkan pendapatannya, sangat bermanfaat dalam merencanakan pembangunan desa lahan kering di Maluku.

Strategi perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan pendapatan petani melalui inovasi. (Ananto, 2007) meliputi; 1. Perencanaan dan pelaksanaan proses pemberdayaan dilakukan secara partisipatif. 2. Perencanaan dari bawah (bottom up planning). 3. Masyarakat diberikan kepercayaan mengelola sendiri dana pembangunan tanpa campur tangan birokrat. 4. Kegiatan pembangunan memberikan peluang kepada petani, masyarakat dan siapapun untuk berkontribusi dalam berbagai bentuk sesuai kemampuannya. 5. Pelibatan tokoh masyarakat sebagai pimpinan non-formal seperti tokoh agama atau tokoh adat memacu partisipasi masyarakat. 6. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan oleh Komite Investasi Desa (KID). 7. Keberlanjutan manfaat pembangunan yang ditentukan dari kegiatan operasional pemanfaatan dan pemeliharaan hasil investasi desa dapat dirancang oleh masyarakat sendiri dan bila perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan desa (PERDES).

Pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan yang keduanya saling terkait dan memerlukan dukungan multisektoral dalam program-programnya. Pembangunan pertanian termasuk pemberdayaan petaninya mencakup berbagai kegiatan dari hulu dan hilir. Kegiatan hulu terutama menyangkut produksi primer (budidayanya) berbagai komoditas pertanian. Sedangkan kegiatan di hilir mencakup penanganan hasil panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran berbagai produk pangan dan non pangan. Kegiatan usaha produk turunan yang berbahan baku hasil pertanian seperti dilakukan oleh pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi bagi pendapatan penduduk pedesaan maupun perkotaan.

Kegiatan produksi primer yang umumnya berupa kegiatan budidaya, memerlukan dukungan sektor lain yang terkait dengan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan pengendali hama dan penyakit, peralatan dan mesin pertanian. Kebutuhan sarana produksi ini terkait dengan dukungan sektor industri dan perdagangan. Sedangkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi diharapkan sektor pekerjaan umum dapat berperan sebagaimana dalam kegiatan investasi desa untuk infrastruktur pertanian.

Pembangunan Ketahanan Pangan

Rumusan umum ketahanan pangan 2006-2009 (Dewan Ketahanan Pangan, 2006), menyatakan bahwa ketahanan pangan akan terwujud bila: (1) pangan tersedia secara cukup dan merata untuk seluruh penduduk dan (2) setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi atas pangan untuk hidup sehat dan produktif. Dalam membangun ketahanan pangan ada dua persoalan yang mendasar. Pertama, adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan produksi pangan domestik. Hal ini disebabkan dari pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, kerendahan gizi, konversi lahan pertanian, dinamika harga-harga input dan anggaran perawatan inovasi teknologi (Suryana, 2000). Kedua, besarnya proporsi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari dua permasalahan di atas telah ditetapkan arah pembangunan ketahanan pangan yaitu: (1) mewujudkan kemandirian pangan guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah, hingga rumah tangga (2) perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. (pemerintah, masyarakat termasuk swasta)

Salah satu tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta individu. Dengan tolak ukur pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangannya adalah (Dewan Ketahanan Pangan, 2006): (1) mempertahankan ketersediaan energi dan protein perkapita minimal 2.200 kkal/hari dan 57 gr/hari, (2) meningkatkan konsumsi pangan untuk memenuhi kecukupan energi dan protein per kapita minimal 2.000 kkal/hari dan 52 gr/hari, (3)

meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang diukur oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80 (4) meningkatkan keamanan, mutu dan kesehatan pangan yang di konsumsi dan (5) mengurangi penduduk rawan pangan kronis, yang mengonsumsi kurang dari 80% Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan laju sebesar 1%/tahun.

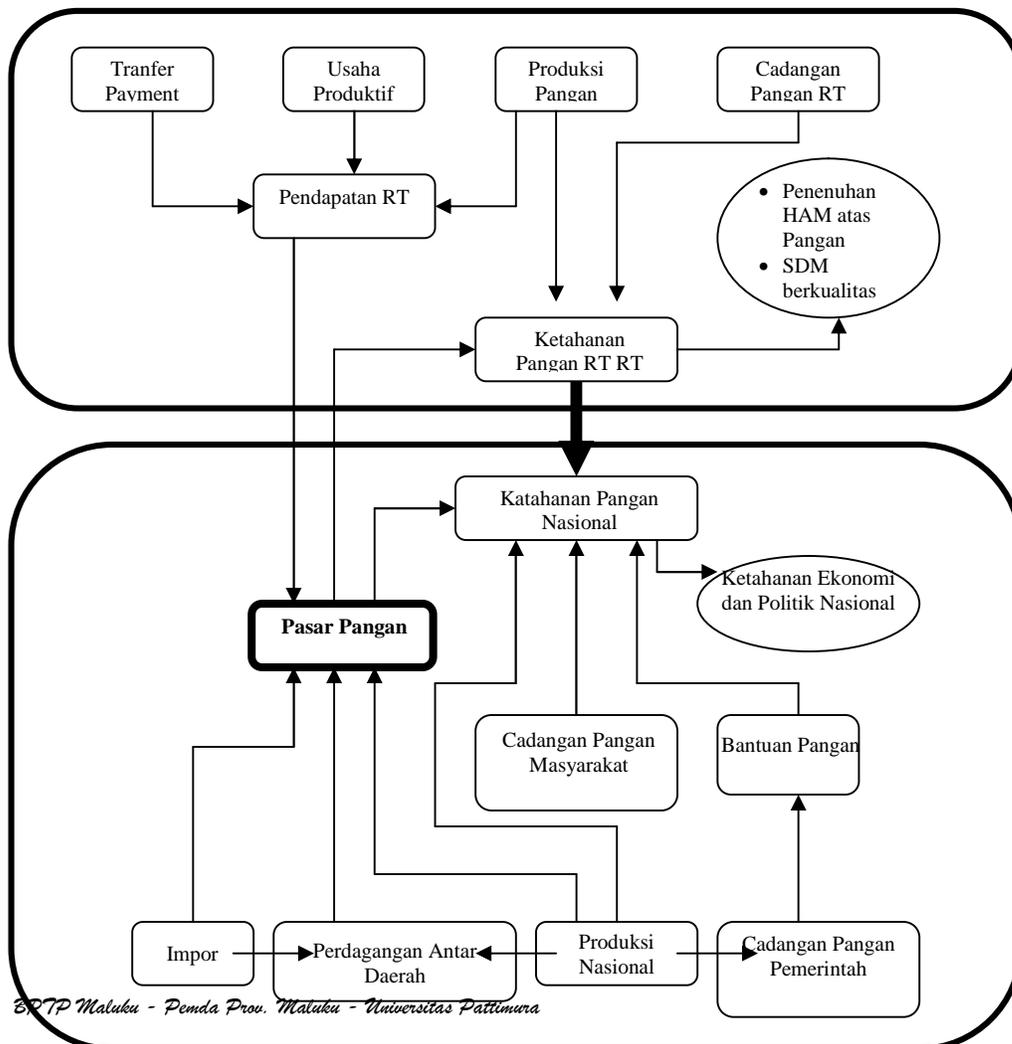
Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan dapat menggunakan strategi yaitu : (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; (2) memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan upaya memberdayakan mereka agar mampu menolong kebutuhan dirinya sendiri.

Ketahanan Pangan Desa di Maluku

Pada prinsipnya, apabila dalam suatu wilayah desa kondisi ketahanan pangan untuk setiap rumah tanggatercapai, maka ketahanan pangan di desa itu akan tercapai dan selanjutnya akan berkembang hingga tingkat nasional.

Menurut Suryana, (2007) ada tiga komponen utama pembentuk ketahanan pangan rumah tangga (RT) yaitu produksi sendiri, cadangan pangan (stock) dan pendapatan (income). Bagi rumah tangga pertanian komponen produksi menjadi unsur utama, akan tetapi bagi rumah tangga non pertanian pendapatan menjadi sangat penting untuk memperoleh pangan dari pasar.

Uraian tentang keterkaitan variabel ketahanan pangan di tunjukkan dalam gambar I.



Gambar I. Keterkaitan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dengan Ketahanan Pangan Nasional (Sumber : Suryana, 2007)

Maluku dengan 815 desa pertanian memiliki agro ekosistem dan sumber hayati yang beragam. Ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanian di dua belas gugus seperti areal pengembangan pertanian lahan kering seluas 1.801.972 ha, lahan sagu 649.938 ha dan lahan basah 55.612 ha, dapat dijadikan modal dasar dalam penyediaan bahan pangan kedepan.

Kebijakan untuk menetapkan pelaksanaan ketahanan pangan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pangan lokal (Nainggolan, 2004) adalah suatu langkah yang tepat. Ketersediaan pangan lokal yang ada pada desa di Maluku seperti sagu, umbi-umbian, kacang-kacangan, jagung dan padi dalam jumlah yang cukup dan mudah dikembangkan sesuai dengan agroklimat wilayah setempat. Dengan demikian sumber pangan akan bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan selera masyarakat setempat. Dalam usaha membangun ketahanan pangan di desa pada wilayah kepulauan komoditas sagu, umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan dan padi perlu untuk ditingkatkan produktivitasnya. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi (benih/bibit unggul, teknologi pengolahan lahan, penyuluhan, PHT dan pascapanen), dan peningkatan indeks penanaman (IP) dengan cara intensifikasi serta perluasan areal tanam (ekstensifikasi).

Mempertahankan pola konsumsi pangan suatu masyarakat tertentu perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah dengan keterpaduan institusi yang terkait seperti, BAPPEDA, Dinas Pertanian, dan BPTP.

Diversi pangan memiliki dua dimensi pokok yaitu: (1) keragaman pola konsumsi, dan (2) keanekaragaman sumber bahan pangan. Program diversifikasi pangan oleh Pemda Maluku belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kebutuhan beras yang terus bertambah dan mengisi pasar di desa dan wilayah kepulauan sehingga masyarakat di wilayah tersebut menu konsumennya bergeser ke beras. Pola konsumsi masyarakat di desa dan pulau-pulau terpencil umumnya berbasis pada anekan umbi, jagung, sagu dan pisang sebagai sumber karbohidrat, hanya mereka yang tinggal di kota yang mengkonsumsi beras. Dengan demikian diperlukan deliniasi pola konsumsi, ini berkaitan dengan penyediaan pangan yang bersifat spesifik lokasi (Adnyana, 2005).

Upaya diversifikasikan pangan berada dipersimpangan jalan, karena dukungan pemerintah pusat lebih banyak pada peningkatan produksi padi sedangkan sumber alternatif karbohidrat lain seperti umbi-umbian,, jerebia, sagu kurang mendapat perhatian. Pemda Maluku sendiri baru mulai lagi memperhatikan sagu di tahun 2006.

Menurut Suryana (2007) alternatif kebijakan yang ditempuh melalui implementasi empat program pokok untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan adalah:

- Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat.
- Yang paling pokok untuk mencapai ketahanan pangan individu, masyarakat setempat adalah pendapatan atau daya beli. Tanpa pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka ketahanan pangan tidak mungkin dicapai.
- Dengan pendapatan yang meningkat, maka akses rumah tangga pada pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang juga akan meningkat. Program ini penekanannya adalah pda upaya peningkatan kemampuan rumah tangga mengakses pangan, baik dari produksi sendiri atau dari pasar.
- Program Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan
- Dengan program ini diharapkan akan terjadi optimasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis sumberdaya domestik.
- Program Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan

- Ketersediaan pangan sering kali tidak merata, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketimpangan fisik sebagian besar dapat diatasi oleh mekanisme pasar dimana akan terjadi aliran dari lokasi surplus ke daerah defisit. Pasar hanya akan bekerja apabila proses ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi pelaku ekonomi. Karenanya dapat dipastikan ada daerah atau kelompok masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh mekanisme pasar. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan, termasuk dalam mengatasi ketimpangan karena hambatan ekonomi atau daya beli. Dengan upaya ini, kerawanan pangan transien (temporer) atau kronis dapat di atasi dengan lebih baik.
- Program Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan
- Penganekaragaman pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui sisi penyediaan pangan beragam dan peningkatan kesadaran masyarakat atas prinsip pangan dan gizi seimbang (Nainggolan, 2007). Upaya diversifikasi pangan dilakukan melalui berbagai program tetapi hasil kinerjanya tidak nyata. Hal ini karena kebijakan pangan dan ketahanan pangan lebih terfokus pada upaya penyediaan sehingga kurang menggarap aspek perilaku makan masyarakat. Karena itu perlu ada perubahan pendekatan dalam upaya penganekaragaman pangan tersebut.

Dalam konteks ini mutu konsumsi pangan jauh melebihi pengertian diversifikasi pangan ke arah non beras. Apabila pendekatan ini dilaksanakan, konsumsi pangan akan otomatis terdiversifikasi dari hanya satu pangan pokok ke arah lebih beragam sumber karbohidrat dan dari dominan pada asupan karbohidrat ke arah lebih beragam komposisi asupan kandungan gizi. Dari sisi ekonomi, yang dapat segera terlihat adalah menurunnya konsumsi beras/kapita/tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Di Maluku ada 815 desa (93%) dengan pendapatan penduduknya berasal dari pertanian yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dan memiliki agro ekosistem dan sumber hayati yang beragam, sementara itu masih ada 32,85% penduduk miskin. (tahun 2003).
2. Ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanian di 8 Kabupaten/Kota (12 gugus pulau) seperti lahan kering seluas 1.801.972 ha, lahan sagu 649.938 ha dan lahan basah 55.612 ha, dapat dijadikan modal dasar dalam usaha penyediaan bahan pangan kedepan.
3. Membangun ketahanan pangan Maluku di mulai dengan membangun ketahanan pangan rumah tangga di desa pada wilayah kepulauan, melalui peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan diversifikasi pangan.
4. Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP) dan tingkat ketahanan pangan (TKP) rumah tangga petani. NTP adalah perbandingan antara harga yang diterima dengan karya yang dibayar petani. Sedangkan TKP ditunjukkan atas persediaan pangan di dalam rumah tangga.
5. Diversifikasi pangan memiliki dua dimensi pokok yaitu: (1) keragaman pola konsumsi, dan (2) keanekaragaman sumber bahan pangan. Pola konsumsi masyarakat di desa pada wilayah kepulauan berbasis pada aneka umbi, jagung, sagu (sumber karbohidrat). Hanya mereka yang tinggal di kota yang mengkonsumsi beras, sedangkan sumber protein terutama didapat dari ikan.
6. Membangun ketahanan pangan berarti melakukan peningkatan produktivitas usaha tani, peningkatan produksi dapat dilakukan dengan: (1) pencapaian inovasi teknologi spesifik lokasi (2) peningkatan indeks penanaman (IP) dengan cara intensifikasi dan perluasan areal tanam (ekstensifikasi).
7. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan penyempurnaan program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan selama ini. Adapun keempat program yang di sarankan adalah: (1) peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, (2) peningkatan kapasitas produksi pangan, (3) pengolahan distribusi dan pasar pangan, dan (4) peningkatan mutu konsumsi pangan.

8. Pemerintah Daerah (BAPPEDA, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota), BPTP dan masyarakat desa/petani berpartisipasi secara aktif dan rasa memiliki dalam membangun ketahanan pangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Dengan penguatan modalnya dan kelembagaan kelompok di fasilitasi oleh pemerintah (Pusat dan Daerah).
9. Dalam membangun ketahanan pangan desa, institusi seperti Pekerjaan Umum, Koperasi, Bulog, dan Perdagangan mempunyai tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. 2005 Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 3 No.3 Desember 2005 : 326-348.
- Ananto. E, 2007. Menjadikan P4MI sebagai Ujung Tombak Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pedesaan. Makalah Pada Lokakarya Nasional Akselerasi Desiminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa, Bogor 27 Agustus 2007.
- Arifin, B, 2004. Penyediaan dan Aksesibilitas Katahanan Pangan dalam Soekirman dkk (eds). Prosiding WKNP8 VIII. Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta.
- BPS Maluku, 2005. Maluku Dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- BPS Maluku, 2006. Survey Ekonomi Pertanian Tahun 2003. Statistik Rumah Tangga Pertanian. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- BPS Maluku, 2006 a. Sensus Ekonomi Tahun 2005. Statistik Potensi Desa Propinsi Maluku 2005. Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku.
- BPS Maluku, 2006 b. Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Padi & Palawija) Propinsi Maluku 2005. Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku.
- BPS Maluku 2006 c. Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Maluku 2003. Kerjasama BPS Propinsi Maluku Dengan Bappeda Propinsi Maluku.
- BPTP Maluku, 1999. Peta Zona Agroekologi Skala I : 250.000 Wilayah Propinsi Maluku (Termasuk Maluku Utara) BPTP Maluku. Ambon.
- Dewan Ketahanan Pangan, 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta.
- Louhenapessy, J.E. 2006. Potensi dan Pengelolaan Sagu di Maluku Makalah Pada Lokakarya Sagu Dengan Tema Sagu Dalam Revitalisasi Pertanian Maluku, 29-30 Mei 2006 Kerjasama Universitas Pattimura, Bappeda Maluku, Dinas Pertanian Maluku dan BPTP Maluku. Ambon.
- Nainggolan, K. 2004. Strategi dan Kebijakan Pangan Tradisional dalam Rangka Ketahanan Pangan. **Dalam** Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Pangan Tradisional; Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian. Bogor.
- Sudana. W; M.H. Togatrop; I.S. Anugrah; M. Mardiharini, A. Supriatna; Andriati; R.S.H. Pribadi, 2007. Materi Seminar Hasil Pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Ekonomi Pedesaan T.A. 2006. BBP2TP. Bogor 15 Pebruari 2007.
- Suryahadi. A, 2007. Pemikiran Tentang Pendekatan Pembangunan Desa. Makalah Pada Lokakarya Nasional Akselerasi Desiminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa. Bogor. 27 Agustus 2007.
- Suryana. A, 2000. Peran Sektor Pertanian Dalam Memenuhi Kecukupan Pangan Nasional. **Dalam** Prosiding Kerjasama IPPTP Denpasar dengan Univesitas Udayana Denpasar.
- Suryana, A. 2007. Menelisik Upaya Menggapai Ketahanan Pangan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2007, 73 halaman.